

BAB IV KESIMPULAN

Peran perempuan dalam politik nasional Jepang, merupakan gambaran dari konstruksi sosial masyarakat patriarkal di Jepang. Konsep ‘tatanan simbolik’ Jacques Lacan yang mengatur masyarakat melalui rangkaian tanda, peran, dan ritual, juga berlaku di negara Jepang. Sejalan dengan pemikiran Lacan, masyarakat Jepang juga memiliki pola relasi antara perempuan dan laki-laki, yang mengacu pada ‘tatanan ayah’. Meskipun patriarki bukan merupakan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Jepang sendiri, melainkan melalui intervensi dengan dunia luar seperti dengan ajaran yang berkembang dari Cina ---Konfusianisme, Budhisme, Shintoisme, Taoisme--- dan ajaran Barat ---agama Kristen---, tetapi struktur patriarki yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Jepang memiliki pengaruh yang kuat dalam hubungan relasi gender di Jepang.

Dalam dunia politik, peran perempuan Jepang masih belum menunjukkan representasi yang dominan. Meskipun pada periode 1980-1990 jumlah perempuan yang berpartisipasi di bidang politik mengalami peningkatan dalam jumlah, tetapi hal ini tidak menjamin keberhasilan kaum perempuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam pengambilan keputusan vital di Parlemen.

Peran perempuan dalam politik nasional Jepang 1980-1990 ternyata masih dilatari berbagai kepentingan dari para politisi laki-laki, yang selama ini mendominasi kekuasaan di pemerintahan nasional. Walau salah seorang politisi perempuan, Doi Takako, berhasil menduduki jabatan tertinggi dalam Partai Sosialis Demokrat, kekuasaannya justru dihasilkan dari dukungan kaum laki-laki ---dalam hal ini para politisi laki-laki dalam Partai Sosialis Demokrat---. Jabatan tersebut memang diakui sebagai perubahan besar dalam dunia politik Jepang yang selama ini belum mengakui perempuan sebagai figur yang dapat dijadikan ‘pimpinan’ organisasi, tetapi hal tersebut bukanlah sesuatu yang didapat dari hasil perjuangan kaum perempuan. Kembali lagi, kesempatan perempuan untuk memimpin partai ---sama halnya dengan

kesempatan untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Parlemen--- menjadi suatu hak yang 'diberikan' oleh otoritas yang lebih tinggi.

Perempuan Jepang sendiri, masih belum memperlihatkan aktifitas yang dominan dalam memperjuangkan peran sertanya dalam politik nasional. Peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam politik memang sedikit demi sedikit terjadi, dan hal tersebut adalah kemajuan yang besar dalam upaya menciptakan kesetaraan gender.

Perlu disadari, bahwa kesetaraan gender sesungguhnya bukan hanya mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki, tetapi juga mendapatkan hak untuk bebas menentukan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh para feminis posmodern; sebagai penyandang status 'nomor dua', atau sebagai kaum yang termarginalkan, perempuan memiliki peluang untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ke-liyan-an perempuan, dapat memberi masukan pada konstruksi sosial yang sudah ada sebelumnya, karena sang 'liyan' dapat merasakan ketidakadilan yang tidak dirasakan sang 'diri', yang dalam konteks ini adalah kaum yang dominan. Pandangan perempuan semestinya dapat menciptakan arah baru dari 'tatanan' yang sudah ada sebelumnya, baik 'tatanan ayah' maupun 'tatanan simbolik'. Melalui sudut pandangnya, perempuan dapat memberikan *image* baru terhadap sistem masyarakat yang selama ini berada di bawah dominasi kultur patriarki.

Sesungguhnya kesetaraan gender merupakan suatu konsep yang kompleks dan sulit untuk dicapai. Terkecuali diadakan perubahan total dalam institusi budaya, norma, nilai dan agama yang selama ini memberikan nilai normatif tinggi akan adanya peran-peran gender. Konstruksi sosial sangat berperan dalam menyebabkan timbulnya perbedaan perlakuan terhadap perempuan. Apa yang dimaksud sifat alamiah atau kodrat perempuan merupakan hasil rekayasa sosial yang didominasi kaum laki-laki. Dan berbeda dari bentuk dominasi lainnya, dominasi laki-laki atas perempuan cenderung dianggap wajar, bahkan oleh sebagian besar perempuan itu sendiri.

Selain konstruksi sosial, kendala struktural juga melatari mengapa perempuan menganggap wajar bentuk ketidakadilan gender. Struktur patriarki Jepang yang kuat

memberikan sedikit peluang bagi perempuan untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapatnya di dunia publik, dan struktur tersebut tidak dapat diubah tanpa melalui proses yang panjang, yang tentunya memerlukan kesadaran baik dari kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Pengaruh lain seperti struktur pendidikan, juga perlu dikaji ulang untuk mendapatkan pandangan baru mengenai konsep kesetaraan gender. Dengan adanya pendidikan yang berbasis kesetaraan gender, diharapkan masyarakat akan terbiasa untuk menerapkan kesetaraan hak, kewajiban, dan kesempatan di segala bidang kehidupan. Struktur ekonomi yang cenderung memihak kaum laki-laki juga perlu untuk dikaji kembali. Apabila perempuan mendapat kesempatan untuk memiliki kepemilikan modal serta gaji yang sesuai, diharapkan partisipasi mereka di dunia publik juga dapat lebih dominan.

Rangkaian tanda, peran dan ritual memang tidak dapat serta merta diubah, karena proses pembentukannya berlangsung selama berabad-abad. Konsep tanda, peran, dan ritual telah terpatri dalam ranah ketidaksadaran manusia, kemudian melahirkan konstruksi sosial di masyarakat. Untuk mengubah cara pandang yang sudah seperti 'jati diri' masyarakat Jepang, perlu ada perubahan mendasar dalam institusi dasar negara. Parlemen nasional, dapat menjadi titik awal untuk memicu lahirnya konsep dan cara pandang baru yang lebih menerapkan keadilan gender.

Memang, tidak ada kata 'wajib' bagi perempuan untuk ikut serta dalam arena politik. Akan tetapi representasi dari kaum perempuan sangat penting untuk merepresentasikan sudut pandang kaum yang termarginalkan ---dalam hal ini perempuan---. Dunia merupakan kesatuan yang terdiri dari hal positif dan negatif, dominan dan marginal, 'Diri' dan sang Liyan. Oleh karena itu, sudah semestinya dalam berbagai bidang, kedua 'oposisi biner' ini berdiri dalam keseimbangan dan sikap saling menghormati. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, diharapkan harmoni dalam kehidupan dapat tercipta.